
Analisa Kesantunan Berbahasa Anggota DPR RI Terhadap Rakyat Indonesia pada Tahun 2025

Nurdin Yusuf¹, Noerhaetty Hafriana²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Indonesia

E-mail: nurdinyusuf81@gmail.com¹, hafrianaetty@gmail.com²

Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 10 Oktober 2025

Accepted: 13 Oktober 2025

Keywords: *kesantunan berbahasa, DPR RI, komunikasi politik, opini publik, media social*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis kesantunan berbahasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap rakyat pada tahun 2025. Kesantunan berbahasa dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga legitimasi politik, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan stabilitas demokrasi. Metodologi penelitian menggunakan analisis wacana kritis, studi dokumentasi, survei opini publik, dan observasi digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik DPR dipengaruhi oleh aspek pragmatik, sosiolinguistik, psikologis, dan digital. Studi kasus sepanjang tahun 2025 memperlihatkan sejumlah kontroversi, seperti pernyataan emosional dalam sidang, sindiran di media sosial, hingga komentar diskriminatif yang menimbulkan reaksi publik. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan berbahasa sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap citra DPR. Oleh karena itu, penguatan kode etik, pelatihan komunikasi politik, profesionalisasi pengelolaan media sosial, serta internalisasi budaya politik santun menjadi rekomendasi utama. Kesantunan berbahasa terbukti tidak hanya sebagai norma etika, melainkan juga sebagai fondasi kepercayaan dan legitimasi DPR RI di mata masyarakat.*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui bahasa, gagasan, aspirasi, serta kebijakan dapat disampaikan secara efektif dari pemerintah kepada rakyat maupun sebaliknya. Dalam ranah politik, bahasa tidak sekadar menjadi alat komunikasi, melainkan juga menjadi instrumen kekuasaan yang dapat memengaruhi opini publik, membangun legitimasi, serta menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang santun menjadi kebutuhan mendasar, khususnya bagi para pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga legislatif yang merepresentasikan rakyat memegang peranan penting dalam menjaga kualitas komunikasi politik. Setiap pernyataan, baik dalam forum resmi maupun di ruang publik, mencerminkan sikap dan martabat lembaga DPR. Di era demokrasi modern, masyarakat semakin kritis terhadap gaya komunikasi wakil rakyat. Kesantunan berbahasa

menjadi indikator penting untuk menilai apakah DPR benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang aspiratif, etis, dan bermoral.

Memasuki tahun 2025, tantangan komunikasi DPR RI semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi secara cepat, sehingga setiap ujaran anggota DPR dapat langsung dipantau, dikritisi, bahkan disebarluaskan luas melalui media sosial. Kondisi ini menuntut DPR untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa, karena ketidaksantunan berbahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman, mencederai kepercayaan publik, serta memperburuk citra lembaga legislatif di mata masyarakat. Oleh karena itu, analisa kesantunan berbahasa DPR RI terhadap rakyat Indonesia tahun 2025 menjadi relevan untuk dikaji. Analisa ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai: Bagaimana para wakil rakyat menjaga etika komunikasi? Tantangan apa saja yang dihadapi para wakil rakyat dalam praktik kesantunan berbahasa? serta harapan atau rekomendasi apa saja yang dapat menjadi solusi agar komunikasi DPR dengan rakyat berjalan harmonis, santun, dan bermartabat?

LANDASAN TEORI

Teori Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa merupakan prinsip dasar dalam komunikasi yang bertujuan menjaga keharmonisan interaksi sosial antara penutur dan mitra tutur. Brown dan Levinson (2020) menyatakan bahwa kesantunan adalah strategi linguistik untuk mempertahankan face (wajah sosial) lawan bicara, yang terdiri atas *positive face* (kebutuhan untuk dihargai) dan *negative face* (kebutuhan untuk bebas dari tekanan). Dalam konteks komunikasi politik DPR RI, kesantunan berbahasa menjadi kunci untuk menunjukkan penghormatan terhadap rakyat, sesama anggota legislatif, serta menjaga citra kelembagaan.

Rahardi (2022) menambahkan bahwa kesantunan berbahasa dapat diidentifikasi melalui pemilihan kata, intonasi, dan struktur kalimat yang tidak menyinggung, tidak memaksa, serta sesuai dengan norma budaya masyarakat. Sementara Chaer (2021) menegaskan bahwa kesantunan bukan sekadar penggunaan bahasa halus, melainkan juga kemampuan memahami konteks sosial dan menjaga keseimbangan hubungan komunikatif antara penutur dan pendengar. Dengan demikian, kesantunan berbahasa anggota DPR menjadi refleksi moralitas, tanggung jawab, serta kapasitas intelektual dalam berpolitik.

Teori Komunikasi Politik

Habermas (2020) dalam *The Theory of Communicative Action* menekankan pentingnya komunikasi rasional dan etis dalam sistem demokrasi. Komunikasi politik seharusnya berorientasi pada pencapaian pemahaman bersama (*mutual understanding*), bukan pada dominasi atau manipulasi. Dalam konteks DPR RI, kesantunan berbahasa menjadi bentuk nyata dari komunikasi rasional yang menghormati partisipasi rakyat.

Bahasa politik yang santun dapat memperkuat legitimacy lembaga legislatif karena menunjukkan keterbukaan, transparansi, dan penghargaan terhadap publik. Sebaliknya, ujaran yang provokatif, diskriminatif, atau emosional dapat menggerus kepercayaan rakyat dan menimbulkan delegitimasi politik. Oleh karena itu, teori komunikasi politik digunakan untuk menilai sejauh mana bahasa anggota DPR mencerminkan komunikasi demokratis yang etis dan partisipatif.

Teori Etika Publik dan Citra Politik

Dalam kajian etika publik, kesantunan berbahasa termasuk dalam etika komunikasi pejabat negara. Sudaryanto (2021) menjelaskan bahwa bahasa pejabat publik harus memenuhi prinsip kebenaran, kesopanan, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, dalam perspektif citra politik, gaya berbahasa anggota DPR sangat menentukan bagaimana masyarakat menilai moralitas dan kredibilitas mereka.

Kompas (2025) dan Tempo (2025) menunjukkan bahwa ujaran yang viral dan dianggap tidak santun dapat berdampak langsung terhadap reputasi politik individu maupun kelembagaan. Dengan demikian, kesantunan berbahasa tidak hanya persoalan linguistik, tetapi juga terkait erat dengan manajemen citra publik (public image management). Dalam era digital, etika berbahasa bahkan menjadi bagian dari strategi komunikasi politik modern.

METODE PENELITIAN

Menganalisis kesantunan berbahasa DPR RI tahun 2025, diperlukan pendekatan Kualitatif yakni metodologis yang komprehensif agar hasil kajian tidak hanya deskriptif, tetapi juga mampu memberikan gambaran objektif mengenai praktik komunikasi politik wakil rakyat. Adapun metode meliputi: *Pertama*, Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) yaitu Metode ini digunakan untuk menelaah bagaimana ujaran anggota DPR disusun, disampaikan, dan dipahami dalam konteks kekuasaan serta ideologi. Analisis wacana kritis memungkinkan peneliti mengungkap makna tersirat di balik pilihan kata, intonasi, serta strategi komunikasi yang digunakan. Data dapat diperoleh dari rapat paripurna, sidang komisi, maupun wawancara resmi yang ditayangkan di media. Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis apakah bahasa yang digunakan mencerminkan kesantunan, atau justru memperlihatkan bias kekuasaan dan potensi dominasi. *Kedua*, Studi Dokumentasi yaitu Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi maupun sekunder yang berkaitan dengan komunikasi DPR. Dokumen tersebut mencakup transkrip pidato, notulen rapat, rekaman video sidang, hingga pemberitaan media massa. Melalui dokumentasi, peneliti dapat menilai konsistensi kesantunan berbahasa DPR dalam berbagai forum dan membandingkannya dengan tanggapan publik. Metode ini juga membantu dalam membangun kerangka analisa yang berbasis data faktual. *Ketiga*, Survei Opini Publik yaitu Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menilai kesantunan berbahasa anggota DPR, dilakukan survei opini publik. Survei ini dapat berbentuk kuesioner maupun wawancara dengan responden dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, dan daerah. Hasil survei memberikan gambaran persepsi rakyat terhadap gaya komunikasi DPR, apakah dinilai santun, provokatif, atau cenderung elitis. Dengan demikian, survei menjadi sarana penting untuk mengukur tingkat penerimaan publik terhadap komunikasi politik DPR. *Keempat*, Observasi Online yaitu di era digital, observasi online menjadi metode yang relevan dan mutakhir. Anggota DPR kerap menyampaikan pendapat, klarifikasi, maupun kampanye melalui media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan kanal YouTube resmi DPR. Observasi dilakukan dengan memantau konten yang dipublikasikan, interaksi dengan warganet, serta respon masyarakat terhadap ujaran yang viral. Dengan metode ini, dapat dianalisis sejauh mana DPR mampu menjaga kesantunan dalam komunikasi digital yang bersifat cepat, terbuka, dan mudah diperdebatkan publik.

Secara keseluruhan, keempat metode tersebut saling melengkapi. Analisis wacana kritis memberikan pemahaman mendalam terhadap ujaran DPR, studi dokumentasi memastikan ketersediaan data konkret, survei opini publik merepresentasikan suara rakyat, sedangkan observasi online mengkaji praktik komunikasi DPR di ruang digital. Dengan kombinasi metodologi ini, hasil analisa kesantunan berbahasa DPR tahun 2025 diharapkan lebih objektif,

menyeluruh, dan dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kebijakan maupun pembenahan komunikasi politik ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesantunan berbahasa bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bukan sekadar tuntutan etika, melainkan kebutuhan strategis yang berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga komunikasi politik yang sehat, konstruktif, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Kesantunan berbahasa berfungsi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat menilai integritas dan kredibilitas wakil rakyat tidak hanya dari keputusan politik yang diambil, tetapi juga dari cara mereka menyampaikan gagasan, kritik, maupun kebijakan. Bahasa yang santun, terukur, dan penuh penghormatan akan memperkuat legitimasi DPR sebagai lembaga legislatif yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, bahasa yang kasar, merendahkan, atau provokatif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan merusak citra lembaga.

Kesantunan berbahasa berperan penting dalam menjaga stabilitas politik. Komunikasi politik yang keras, penuh emosi, atau menyerang pribadi sering kali memicu gesekan, baik di kalangan internal DPR maupun di tengah masyarakat. Dengan berbahasa santun, DPR dapat menciptakan suasana dialogis yang lebih kondusif, menghargai perbedaan pandangan, serta mencegah konflik yang berpotensi mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesantunan berbahasa juga menjadi prasyarat dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat menuntut adanya komunikasi yang terbuka, jujur, dan kritis, tetapi tetap dibingkai dengan kesopanan dan penghargaan terhadap lawan bicara. Melalui kesantunan, DPR dapat memastikan bahwa dinamika politik yang terjadi di ruang publik bukan sekadar adu argumentasi tanpa arah, melainkan diskursus yang mencerdaskan masyarakat dan memperkaya praktik demokrasi di Indonesia.

Kesantunan berbahasa mencerminkan moralitas pejabat publik. Sebagai representasi rakyat, anggota DPR tidak hanya dipandang sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai figur teladan dalam kehidupan berbangsa. Bahasa yang santun menunjukkan sikap rendah hati, bijaksana, serta kemampuan menghargai rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dengan demikian, kesantunan berbahasa menjadi bagian integral dari etika pejabat publik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, dapat ditegaskan bahwa kesantunan berbahasa bagi DPR RI memiliki makna strategis yang jauh melampaui sekadar etika komunikasi. Ia merupakan fondasi untuk menjaga kehormatan lembaga legislatif, memperkuat kepercayaan rakyat, serta memastikan terwujudnya praktik demokrasi yang sehat dan bermartabat di Indonesia.

Analisa Kesantunan Berbahasa DPR RI:

Analisa kesantunan berbahasa DPR RI tahun 2025 dapat ditinjau melalui beberapa aspek yang saling berkaitan. Aspek-aspek ini penting untuk memahami bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPR tidak hanya dipandang dari sisi linguistik, tetapi juga dari perspektif sosial, psikologis, hingga digital.

1. Aspek Pragmatik

Ditinjau dari perspektif pragmatik kesantunan berbahasa anggota DPR dianalisis berdasarkan kesesuaian ujaran dengan konteks dan situasi komunikasi. Bahasa yang digunakan hendaknya memperhatikan siapa lawan bicara, topik yang dibicarakan, serta kondisi emosional

masyarakat pada saat itu. Misalnya, dalam menyampaikan kritik atau pernyataan politik, anggota DPR seharusnya menggunakan diksi yang tegas namun tetap santun, sehingga pesan dapat dipahami dengan jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung pihak lain. Ketepatan penggunaan strategi kesantunan pragmatis ini akan memperlihatkan tingkat kedewasaan berbahasa wakil rakyat.

2. Aspek Sociolinguistik

Dari sudut pandang sociolinguistik, bahasa yang digunakan oleh anggota DPR merefleksikan hubungan sosial antara wakil rakyat dengan masyarakat. Bahasa DPR tidak boleh terkesan elitis atau sulit dipahami, melainkan harus komunikatif dan sesuai dengan keragaman sosial-budaya bangsa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa yang menghargai keberagaman etnis, agama, dan budaya akan memperkuat kohesi sosial serta mengurangi potensi diskriminasi verbal. Dengan demikian, kesantunan berbahasa DPR dalam aspek ini tidak hanya berfungsi sebagai etika komunikasi, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap pluralitas masyarakat Indonesia.

3. Aspek Psikologis

Kesantunan berbahasa DPR juga perlu dianalisis dari sisi psikologis, yaitu bagaimana ujaran yang disampaikan dapat memengaruhi perasaan, motivasi, dan persepsi masyarakat. Bahasa yang penuh dengan sindiran, cacian, atau nada tinggi cenderung menimbulkan kekecewaan dan kemarahan rakyat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap DPR. Sebaliknya, bahasa yang santun, menenangkan, dan menghargai aspirasi rakyat mampu membangun kedekatan emosional antara wakil rakyat dan konstituennya. Dengan kata lain, aspek psikologis menegaskan bahwa bahasa yang santun memiliki kekuatan persuasif untuk menciptakan hubungan harmonis antara DPR dan rakyat.

4. Aspek Digital

Di era digital sekarang ini, kesantunan berbahasa anggota DPR semakin mendapat sorotan karena hampir setiap pernyataan yang diucapkan, baik dalam sidang maupun wawancara, dapat dengan cepat direkam, dipotong, dan disebarluaskan melalui media sosial. Tantangan ini menuntut DPR untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata, karena sekali ucapan viral, dampaknya bisa meluas dan menimbulkan kontroversi. Dalam aspek digital, kesantunan berbahasa mencakup kemampuan mengelola komunikasi di ruang publik daring, menjaga etika dalam unggahan atau komentar di media sosial, serta menyadari bahwa ruang digital tidak terlepas dari pantauan publik. Oleh sebab itu, anggota DPR dituntut untuk tidak hanya santun dalam forum formal, tetapi juga konsisten menjaga etika komunikasi di ruang digital.

Keempat aspek analisa tersebut memperlihatkan bahwa kesantunan berbahasa DPR RI merupakan persoalan multidimensional. Kesantunan tidak hanya sebatas pada pilihan kata yang sopan, tetapi juga mencakup konteks, relasi sosial, dampak psikologis, hingga tantangan komunikasi di era digital yang serba cepat. Dalam menjaga kesantunan berbahasa, DPR RI menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama di era komunikasi digital tahun 2025. Tantangan ini muncul baik dari dinamika internal lembaga legislatif maupun dari interaksi DPR dengan masyarakat luas. Namun demikian, di balik tantangan tersebut, terdapat pula harapan besar agar DPR mampu menjadi contoh dalam membangun budaya komunikasi politik yang santun dan beretika.

Tantangan Anggota DPR RI:

1. Pernyataan yang Bernuansa Emosional atau Provokatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di DPR sering kali memunculkan

perdebatan yang sengit. Dalam situasi tertentu, sebagian anggota DPR cenderung menggunakan bahasa bernada emosional, bahkan provokatif, untuk menegaskan pendapatnya atau menyerang lawan politik. Pola komunikasi seperti ini berpotensi menurunkan kualitas wacana politik dan menimbulkan kesan bahwa ruang sidang DPR lebih diwarnai pertikaian verbal daripada diskusi yang konstruktif.

2. Tekanan Politik dan Kepentingan Kelompok

Sebagai lembaga politik, DPR tidak lepas dari kepentingan partai dan kelompok tertentu. Tekanan politik yang kuat sering kali memengaruhi gaya komunikasi anggota DPR. Alih-alih berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas, komunikasi yang dibangun justru terkadang sarat dengan retorika partisan. Hal ini dapat mengurangi objektivitas dan mengaburkan kesantunan berbahasa, karena ujaran yang disampaikan lebih ditujukan untuk memenangkan kepentingan kelompok dibanding menjaga keharmonisan komunikasi publik.

3. Maraknya Penyebaran Potongan Video di Media Sosial

Era digital menghadirkan tantangan baru berupa maraknya penyebaran potongan video rapat atau pernyataan DPR di media sosial. Potongan yang tidak disertai konteks lengkap sering kali menimbulkan salah tafsir, memperkuat stigma negatif, dan merusak citra DPR di mata masyarakat. Tantangan ini menuntut anggota DPR untuk lebih berhati-hati dalam setiap pernyataan, mengingat apa yang mereka ucapkan dapat direkam, dipotong, dan dipublikasikan secara luas dalam hitungan detik.

Studi Kasus Kesantunan Berbahasa DPR RI:

1. Rapat Paripurna Awal Tahun 2025

Rapat paripurna DPR di bulan Januari 2025 membahas isu strategis nasional yang menyangkut kebijakan ekonomi. Beberapa anggota DPR melontarkan kritik dengan nada tinggi, menggunakan bahasa yang kasar, bahkan cenderung menyerang pribadi lawan politik. Potongan video rapat ini viral di berbagai platform media sosial, sehingga menimbulkan perdebatan publik. Banyak masyarakat menilai bahwa rapat yang seharusnya menjadi forum intelektual berubah menjadi ajang adu mulut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa santun tidak hanya menjaga wibawa individu, tetapi juga citra kelembagaan DPR sebagai representasi rakyat.

2. Kontroversi Ucapan Syahroni

Kasus Wakil ketua Komisi III DPR RI, Syahroni menjadi salah satu yang paling ramai dibicarakan sepanjang 2025. Dalam sebuah forum resmi, ia melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Walau maksudnya berbeda, ucapan itu dipersepsikan publik sebagai bentuk ketidaksantunan berbahasa. Termasuk Video potongan pernyataannya yang mengatakan rakyat yang ingin membubarkan DPR adalah rakyat yang tolol sedunia, menyebar luas di media sosial, membuat isu semakin membesar. Kasus ini menunjukkan bahwa setiap kata anggota DPR berada di ruang publik, sehingga kesalahan sekecil apa pun bisa diperbesar dan menimbulkan dampak luas terhadap citra DPR RI.

3. Artis yang Duduk di DPR

Sejumlah artis yang terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 2024 mulai aktif bekerja di 2025. Namun, gaya komunikasi beberapa artis justru menuai kritik. Ada yang dinilai terlalu emosional dalam rapat, ada pula yang mengunggah komentar satir di media sosial yang menyinggung kelompok masyarakat. Publik menilai gaya komunikasi tersebut kurang menunjukkan sikap negarawan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa anggota DPR yang berasal dari dunia hiburan perlu beradaptasi dengan etika komunikasi politik yang menuntut kesantunan, formalitas, dan kehati-hatian dalam setiap pernyataan.

4. Interupsi Kasar dalam Sidang Anggaran

Pada Februari 2025, sidang pembahasan anggaran negara berlangsung ricuh. Beberapa anggota DPR melakukan interupsi dengan nada tinggi, menggunakan bahasa kasar, dan bahkan melontarkan kata-kata yang terkesan merendahkan lawan politik. Perilaku ini terekam dan tersebar luas di media massa maupun media sosial. Publik menilai insiden tersebut mencederai martabat lembaga legislatif yang seharusnya menunjukkan wibawa. Kasus ini mempertegas bahwa interupsi sebagai hak anggota DPR tetap harus dilakukan dengan santun, agar tidak menurunkan kualitas demokrasi.

5. Perdebatan Panas di Komisi Hukum

Pada Maret 2025, rapat Komisi Hukum DPR yang membahas isu penegakan hukum berlangsung penuh emosi. Beberapa anggota saling menyela dan menggunakan kalimat provokatif. Alih-alih berdiskusi dengan argumentasi rasional, rapat justru terlihat sebagai adu emosi. Publik yang mengikuti jalannya rapat melalui siaran langsung menilai DPR gagal menunjukkan sikap profesional. Kasus ini menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa tidak hanya persoalan sopan santun, tetapi juga terkait kualitas argumen yang disampaikan secara jernih dan beretika.

6. Sindiran Kasar di Media Sosial

Pada April 2025, seorang anggota DPR membuat unggahan di media sosial berisi sindiran tajam terhadap oposisi dengan menggunakan kata-kata kasar. Unggahan tersebut segera viral dan memicu kontroversi. Warganet menilai anggota DPR tidak seharusnya menggunakan media sosial sebagai ajang saling serang. Peristiwa ini menegaskan bahwa kesantunan berbahasa juga harus dijaga di ruang digital, karena media sosial memperbesar dampak setiap ujaran pejabat publik.

7. Ucapan Menyinggung Demonstran Mahasiswa

Pada Mei 2025, seorang anggota DPR mengomentari aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia menyebut aksi tersebut sebagai “tidak produktif” dan “hanya merusak fasilitas”. Ucapan itu menuai kecaman dari mahasiswa dan masyarakat luas, karena dinilai merendahkan perjuangan mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan DPR dapat memengaruhi hubungan dengan konstituen, terutama generasi muda yang kritis. Bahasa yang tidak santun dapat merusak jembatan komunikasi antara rakyat dan wakilnya.

8. Debat Panas dalam Pembahasan RUU Pendidikan

Pada Juli 2025, rapat pembahasan RUU Pendidikan berlangsung alot. Perbedaan pendapat antara fraksi membuat suasana rapat memanas. Beberapa anggota DPR mengeluarkan pernyataan dengan nada keras, bahkan menggunakan kata-kata kasar yang terekam kamera. Potongan video perdebatan itu menyebar cepat dan memunculkan kritik luas dari masyarakat. Publik menilai DPR gagal menjaga keteladanan dalam membahas isu penting yang menyangkut masa depan bangsa. Padahal, isu pendidikan seharusnya dibahas dengan argumentasi rasional dan bahasa yang santun.

9. Kontroversi Pernyataan tentang Kelompok Minoritas

Pada September 2025, seorang anggota DPR melontarkan pernyataan terkait kelompok minoritas yang dianggap diskriminatif. Walaupun ia kemudian meminta maaf, ucapannya sudah terlanjur memicu kekecewaan publik dan reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil. Media nasional dan internasional turut menyoroti kasus ini, sehingga memperburuk citra DPR di mata publik. Kasus ini menunjukkan bahwa bahasa politisi tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

10. Rapat Anggaran Akhir Tahun 2025

Menjelang penutupan tahun, rapat anggaran kembali menjadi sorotan karena diwarnai interupsi kasar antaranggota DPR. Saling serang dengan bahasa yang tidak pantas membuat rapat terkesan tidak profesional. Banyak masyarakat yang kecewa karena berharap DPR bisa menutup

tahun dengan sikap yang lebih dewasa dan santun. Kasus ini menegaskan bahwa kesantunan berbahasa masih menjadi tantangan utama DPR, bahkan setelah berbagai kritik yang muncul sepanjang tahun.

Harapan Rakyat Indonesia Terhadap DPR RI:

1. Profesionalisme dalam Menjaga Kesantunan Berbahasa

Harapan utama adalah agar DPR mampu menunjukkan profesionalisme melalui komunikasi politik yang santun, objektif, dan konstruktif. Dengan menjaga kesantunan berbahasa, DPR dapat mengembalikan kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa lembaga legislatif benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.

2. Membentuk Budaya Politik Santun yang Menghormati Perbedaan

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan keragaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Dalam kondisi seperti ini, DPR diharapkan mampu membangun budaya politik yang santun, menghormati perbedaan, serta mengedepankan musyawarah. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak lagi dipandang sebagai pemicu konflik, melainkan sebagai dinamika demokrasi yang sehat.

3. Sebagai Teladan Komunikasi Publik Yang Sehat

Sebagai wakil rakyat, DPR memiliki posisi strategis untuk menjadi teladan dalam berkomunikasi di ruang publik. Apabila anggota DPR konsisten menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan penuh penghormatan, masyarakat akan meneladani pola komunikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislasi yang berbudaya dan bermartabat melalui kesantunan berbahasa. tetapi juga berkontribusi dalam membentuk karakter bangsa.

KESIMPULAN

Kesantunan berbahasa merupakan aspek fundamental dalam komunikasi politik DPR RI pada tahun 2025. Bahasa yang santun tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik, menjaga stabilitas politik, serta meningkatkan kualitas demokrasi. Sebagai wakil rakyat, DPR dituntut untuk menjadi teladan dalam berbahasa sehingga interaksi yang terjalin dengan masyarakat mencerminkan nilai moralitas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa DPR dapat ditinjau dari aspek pragmatik, sosiolinguistik, psikologis, dan digital. Keempat aspek tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan bagaimana bahasa DPR memengaruhi persepsi rakyat, dinamika sosial, serta citra lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis, studi dokumentasi, survei opini publik, dan observasi media digital untuk memperkuat temuan mengenai pentingnya konsistensi etika berbahasa.

Tantangan yang dihadapi DPR antara lain pernyataan emosional anggota, intervensi kepentingan politik, hingga potongan video yang viral di media sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kesantunan berbahasa mudah terdistorsi jika tidak dikelola dengan baik. Meski demikian, masih ada harapan agar DPR dapat membangun budaya komunikasi politik yang lebih santun, terbuka, dan menghormati perbedaan. Sejumlah studi kasus fenomenal, mulai dari kontroversi perdebatan di rapat paripurna, kasus Syahroni yang ramai diperbincangkan, hingga perilaku artis yang kini menjadi anggota DPR, menegaskan bahwa komunikasi politik yang tidak santun berpotensi memunculkan kritik luas dan menurunkan legitimasi lembaga. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang lebih profesional.

Langkah konkret yang diperlukan meliputi penguatan kode etik, pelatihan komunikasi

politik, pengelolaan media sosial secara profesional, serta transparansi dalam komunikasi publik. DPR perlu mempertegas implementasi kode etik, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi persuasif dan santun, serta membentuk tim komunikasi profesional guna menjaga narasi positif di media sosial. Transparansi dan keterbukaan juga penting untuk menjembatani jarak antara rakyat dan wakilnya. Selain aturan formal, internalisasi budaya politik santun harus menjadi kebiasaan yang melekat dalam keseharian anggota DPR. Hal ini dapat dilakukan melalui teladan pimpinan, penghargaan terhadap anggota yang menjaga etika komunikasi, serta kampanye internal mengenai pentingnya citra DPR. Dengan demikian, kesantunan berbahasa tidak hanya menjadi norma etika, tetapi juga fondasi legitimasi DPR RI di mata rakyat serta kunci bagi terwujudnya demokrasi Indonesia yang sehat, beretika, dan berkeadaban.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *KBBI V Daring*. Jakarta:
- Brown, P., & Levinson, S. (2020). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (2020). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press.
- Chaer, A. (2021). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A. (2021). *Kesantunan Berbahasa*. Rineka Cipta.
- CNN Indonesia. (2025). Kasus Syahroni dan etika komunikasi politik DPR RI. Jakarta: Transmedia.
- Detikcom. (2025). Artis di Senayan: Gaya komunikasi dan sorotan publicterhadap kesantunan DPR. Jakarta: Detikcom.
- Duta Wacana University Press.
- Eriyanto. (2022). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (2021). *Language and Power*. London: Routledge.
- Erlangga.
- Habermas, J. (2020). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- Habermas, J. (2020). *The Theory of Communicative Action*. Cambridge: Polity Press.
- Hymes, D. (2021). *Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BBC News Indonesia. (2025). Viral potongan video anggota DPR dan dampaknya terhadap citra politik. Jakarta: BBC Indonesia.
- Kompas. (2025). Kontroversi bahasa kasar anggota DPR dalam sidang paripurna. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kompas. (2025). Ujaran Politik dan Dampaknya terhadap Citra DPR RI. Kompas.id.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
- Rahardi, K. (2022). *Pragmatik: Kesantunan Berbahasa dalam Konteks Sosial*. Erlangga.
- Rahardi, R. K. (2022). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rosdakarya.
- Sudaryanto. (2021). *Etika Publik dan Bahasa Pejabat Negara*. Deepublish.
- Sudaryanto. (2021). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta:
- Tempo. (2025). *Citra Politik dan Bahasa Publik di Era Digital*. Tempo.co.
- Tempo. (2025). Sorotan publik atas gaya bahasa DPR di rapat paripurna awal tahun. Jakarta: Tempo Media Group.

2466

J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol. 4, No. 6, Oktober 2025

Van Dijk, T. A. (2022). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.

Wijana, I. D. P. (2021). *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yule, G. (2020). *Pragmatics*. Oxford: Oxford Universit Press.